

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, Wella. “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tanjungpinang”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. 2013
- Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama.” Pada Jurnal Simposium Akuntansi Nasional 12. 2009.
- Aris, Achmad. 100 Penunggak Pajak Terancam Gijzeling. 2010. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=8143&q=&hlm=550> (diakses tanggal 14 Februari 2015)
- Bwoga, Hanata. Yoseph Agus BBN dan Tony Marsyahrul. Pemeriksaan Pajak di Indonesia. Jakarta : Penerbit PT Grasindo. 2005.
- Daring, KBBI. Arti Kata Patuh. 2015. <http://kbbi.web.id/patuh> (diakses tanggal 28 Februari 2015).
- Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pedoman Penulisan Skripsi 2012. Jakarta: FEUNJ. 2012.
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Hariyanto, Yudi. Suhadak dan Siti Ragil. “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” Dalam Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 10 No. 1. 2014.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.” Dalam *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Kemenkeu. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2014 Capai Rp 1.537,2 triliun. 2015. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-tahun-2014-capai-rp15372-triliun> (diakses tanggal 14 Februari 2015)

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. “Pengaruh Kepatuhan , Pemeriksaan dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.3. ISSN : 2302 – 8556. 2014.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Jakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Granit, 2005.
- Pangemanan, Rima Naomi. “Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado”. Dalam Jurnal EMBa Vol.1 No. 3, Hal 730-740. 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK RI Nomor 74/PMK-03/2012 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Sony Devano. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahmawati, Fajar Nur. Sigit Santoso dan Nurhasan Hamidi. “Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta.” Dalam Jupe UNS. Vol. 3 No. 1 Hal. 72-82. 2014.
- Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba empat, 2011.
- Sari, Maria M Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur.” 2010
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Sudadyo, Hanung Tri. “Pengaruh Faktor Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”. 2013
- Sugiyono. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendra, Eupharasia Susy. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Dalam Jurnal Ekonomi Bisnis. 2010. Vol. 15 No.1.

Supriadi, Agust. Lebih Dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak. 2014. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141014175233-78-6372/lebih-dari-50-wajib-pajak-belum-bayar-pajak/> (diakses tanggal 14 Februari 2015).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

Tresno, Indra dan Wulan. “Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman.” Universitas Negeri Jakarta. 2011.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Zain, Muhammad. Manajemen Perpajakan edisi 3. Jakarta: Penerbit salemba empat. 2008